

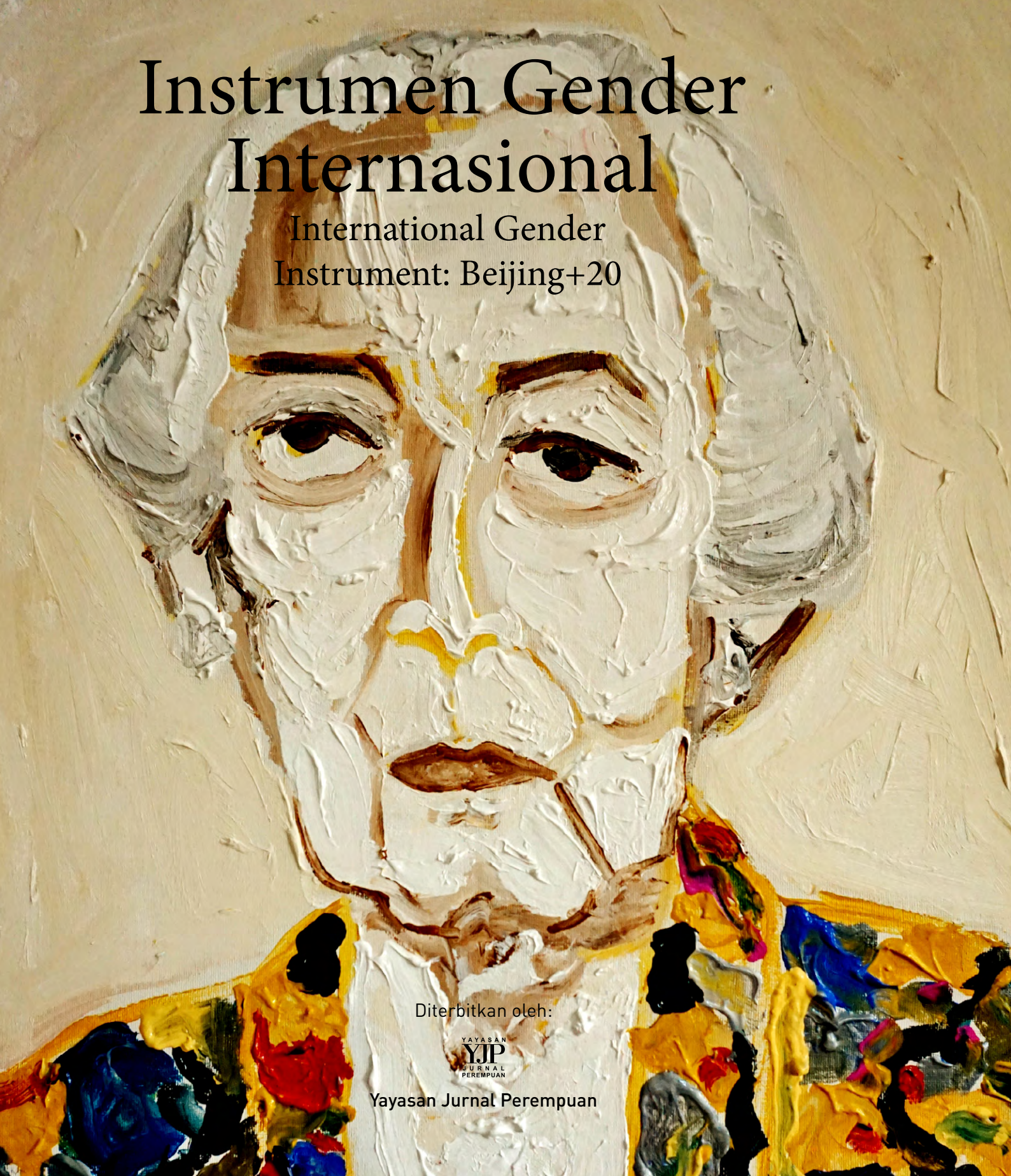
Instrumen Gender Internasional

International Gender
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

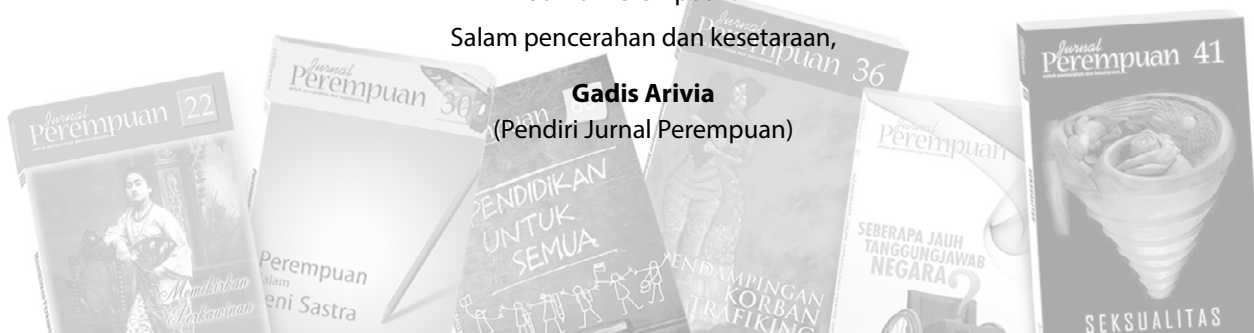
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2015



FORDFOUNDATION

Instrumen Gender Internasional *International Gender Instrument: Beijing+20*

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan? iii-iv

Artikel / Articles

- Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / *Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights*..... 81-89
R. Valentina Sagala
- Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / *What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments* 91-98
Yuyun Wahyuningrum
- Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / *Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage* 99-105
Maria Ulfah Anshor
- Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / *Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy* 107-114
Dwi Ruby Kholifah
- Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / *Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking* 105-121
Lorensia Brahmana
- Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / *Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy*..... 123-131
Masthuriyah Sa'dan
- Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / *Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea* 133-138
Dian Lestariningsih
- Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / *Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics* 139-147
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / *Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"* 149-152
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings 153-154

Profil / Profile

- Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / *Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"* 155-159
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- Pentingnya Memahami Instrumen Gender / *Importance of Understanding International Gender Instruments*..... 161-164
Lola Loveita

Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perih ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok
No.85, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.
Phone:0815-9074-798

Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan

Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)
31901556

Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak

Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan

Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat
45363. Phone:(022) 84288828

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan

Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281. Phone:(0274) 589621

Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia

Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274)
563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotant task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan
& Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12,
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-
83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar
pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacifics women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.

Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Risiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan

Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea

Dian Lestariningsih

PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
SocioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274) 563362

dianlestariningsih@gmail.com

Naskah Diterima 21 Januari 2015. Direvisi 17 Februari 2015. Disetujui: 14 April 2015

Abstract

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotent task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Abstrak

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

Pendahuluan

Data EM-DAT menunjukkan jumlah bencana alam yang tercatat di seluruh dunia selama tahun 2012 adalah 357 kejadian. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi rata-rata jumlah kejadian bencana alam pada tahun 2002-2011, yaitu sebanyak 394 kejadian. Namun demikian jumlah korban meninggal karena bencana alam masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 9,655 orang dari 124.5 juta penyintas di seluruh dunia (Guha-Sapir D, Hoyois Ph., Below. R. *Annual Disaster Statistical Review 2012; The Numbers and Trends*, Brussels; CRED, 2013). Masih banyaknya korban jiwa selain terjadi karena dipengaruhi oleh faktor tingginya populasi dan luasnya lahan yang dihuni manusia, juga dipengaruhi

oleh semakin sempitnya daerah penyangga (*buffer zone*) karena alih fungsi lahan dan perusakan lingkungan. Semakin banyak dan padatnya jumlah penduduk di perkotaan juga meningkatkan kerentanan manusia terhadap bencana alam. Hal ini diperparah dengan kondisi pemukiman di pinggiran kota, khususnya masyarakat miskin kota, yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan lingkungan. Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Margaretha Wahlstrom menuliskan bahwa dari angka sekitar 200 juta korban bencana setiap tahunnya, terdapat lebih

dari 100 juta korban bencana ialah perempuan dan anak. Mengapa? Karena Perempuan dan anak termasuk dalam pengkategorian kelompok rentan.

Dalam praktek penanggulangan bencana, seringkali perempuan dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya karena tidak memiliki kemampuan, pengetahuan dan akses terhadap informasi, pengambilan keputusan dan sumber daya. Hal ini juga makin ditegaskan dengan konstruksi gender yang membuat ketidaksetaraan antara lelaki dan perempuan. Perempuan kemudian dianggap tidak memiliki kapasitas. Hal ini sejalan dengan laporan World Disaster Report 2007: *"Those already marginalized by society—the elderly, women and girls, minority groups and people with disabilities—can become the most vulnerable in a time of crisis. The level of discrimination they face in everyday life is heightened when disaster strikes. Then, too often, these people are invisible both within their own societies and to the national, regional and global communities that mobilize emergency aid"*. Kerentanan menjadi satu dimensi yang menjadi pembeda dan penjelas, walaupun menghadapi ancaman/hazard yang sama, dampak yang ditimbulkan akan ditentukan oleh seberapa kapasitas dan kerentanan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi kapasitasnya untuk mengatasi situasi krisis. Pernyataan ini menegaskan bahwa kerentanan meningkatkan derajat dampak bencana pada seseorang ataupun golongan tertentu

Bagaimana Status Perempuan dalam Bencana di Filipina, Indonesia dan Korea Selatan?

Kehadiran pertambangan di Mindanao, Selatan Filipina, diakui baik sebagai kutukan dan berkat. Lemahnya regulasi industri, di tengah-tengah undang-undang yang ketat di negara itu telah ditoleransi dampak buruk dari industri terhadap lingkungan, budaya masyarakat dan kesehatan manusia. Bencana yang hadir meliputi antara lain: tanah longsor, pendangkalan sungai, kontaminasi merkuri dan sianida di permukaan air dan sumber air minum serta polusi udara. Masalah sosial timbul di masyarakat pertambangan skala kecil saat demam emas dimulai dan uang mulai datang bersama-sama dengan masuknya migran, masuknya narkoba, prostitusi perempuan, senjata dan preman yang mengeksploitasi masyarakat konflik. Dengan makin kentarnya dampak perubahan iklim dan upaya membangun kesiapsiagaan bencana suatu negara

yang sangat rentan seperti Filipina, tentu perlu juga melihat adanya faktor-faktor peninggi risiko seperti bagaimana sebagian komunitas di South Cotobato menyandarkan kesejahteraannya melalui usaha pertambangan.

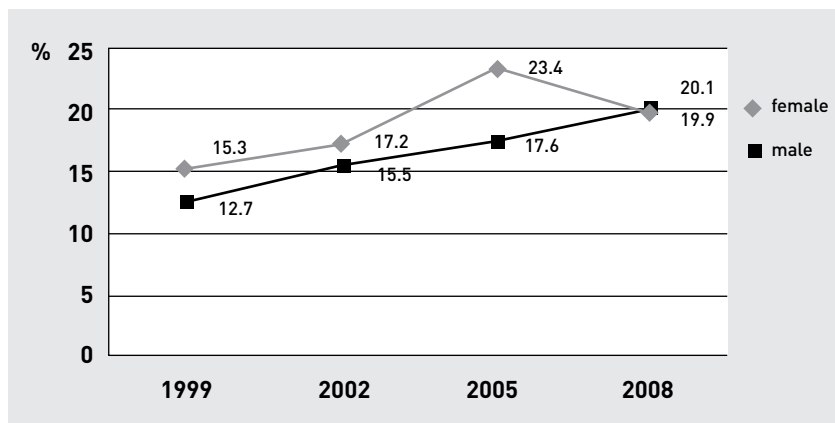
Alternate Forum for Research in Mindanao (AFRIM), mencatat bagaimana kemudian perempuan berupaya untuk menjadi berdaya dan melakukan upaya advokasi guna menuntut hak-hak mereka untuk kesehatan, manfaat sosial dan lingkungan yang seimbang. Organisasi perempuan dikuatkan dan duduk sebagai perwakilan dalam Kelompok Multipihak (Multi Stakeholder Group) untuk bekerja menjalankan mandat dan memastikan akuntabilitas dari usaha pertambangan dan upaya pengurangan risiko bencana. Perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan baru untuk operasi pertambangan skala kecil yang berkelanjutan dan sensitif risiko bencana. Pertama, melalui keanggotaan di dewan yang dilembagakan, perempuan dapat memastikan bahwa semua kebijakan yang akan disusun akan mencakup masalah dan isu-isu perempuan serta anak-anak mereka. Kedua, Perempuan menjadi informan utama dan tokoh kunci dalam mengidentifikasi bencana besar dan ancaman masyarakat. Mereka menjadi perencana utama dalam penyusunan rencana pengembangan masyarakat dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana di masyarakat. Ketiga, perempuan mengidentifikasi dan menyusun prioritas mata pencaharian alternatif yang diidentifikasi oleh para wanita yang akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang masyarakat. Pertanian sayuran dan berkebun rumah tangga diidentifikasi untuk memastikan bahwa makanan akan tersedia selalu untuk keluarga dan masyarakat (Beverly F. Besmanos, AMCDRR 2014).



Gambar 1. Perempuan di Desa Kematu memfasilitasi pembuatan peta risiko bencana

Photo: Beverly Besmanos, Februari 2014

Korea Selatan memiliki pengalaman tersendiri terkait dengan perempuan dan penanggulangan bencana. Dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik ketimbang Filipina dan Indonesia, masyarakat khususnya perempuan mencatat ketidaknyamanan dalam kehidupan kolektif seperti menggunakan toilet, mengganti pakaian dan mandi di tempat pengungsian. Perempuan menyampaikan terkait dengan limitasi dalam merawat anggota keluarga dengan sumber daya yang terbatas dan mereka juga aktif dalam memberikan tekanan untuk memobilisasi sumber daya bantuan. Sedangkan dalam masa pemulihan, perempuan kerap harus memerankan tugas ganda; melakukan peran domestiknya, berpartisipasi dalam upaya pemulihan (memperbaiki tempat tinggal) dan harus turut mencari tambahan penghasilan keluarga. Tercatat pula adanya diskriminasi gender terutama bagi para perempuan sebagai pencari nafkah sebelum bencana. Setelah bencana, perempuan terkena diskriminasi gender karena hilangnya kesempatan penghasilan pendapatan. Menariknya, sejarah solidaritas perempuan dan kegiatan berbasis sukarelawan perempuan di Korea Selatan lebih tinggi dibanding laki-laki. Dalam statistik berikut bisa dilihat bagaimana perempuan di Korea Selatan memiliki kepedulian dan aktif dalam ragam kegiatan sukarelawan.



Gambar 2. Prosentase jumlah kegiatan sukarelawan berdasarkan jenis kelamin (1999-2008)

Sumber Tabel: Korean Women's Development Institute (2009), *A Study on the Economic Values of Female Volunteer Work and Its Supporting Measures*.

Sekitar 20% dari total populasi terdaftar sebagai relawan dimana 74% dari sukarelawan itu adalah perempuan. Pada tahun 2008, tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan relawan adalah 19,9%

atau rata-rata sekitar 1,72 jam per minggu. Satu dari lima warga Korea Selatan berpartisipasi dalam kegiatan sukarela lebih dari satu kali per tahun, satu dari 10 orang Korea melakukan kegiatan sukarelawan per bulan (Eun Ae Lee, Hope Bridge 2012). Ketika terjadi gempa hebat yang menghantam Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006, data di banyak desa mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang meninggal karena berbagai alasan: terjebak di dapur dan kesulitan menyelamatkan diri karena keterbatasan ruang penyelamatan diri, tertimpa reruntuhan rumah karena hendak menyelamatkan anak dan sibuk dengan kerja domestik, hingga lansia perempuan yang sulit menyelamatkan diri karena memakai kain panjang (Fatimah, 2012). Hal yang sama juga ditemukan dalam erupsi Merapi 1994, dimana mayoritas korban adalah lansia perempuan dan anak-anak. Di Padang-Sumatera Barat, pada gempa 2009, sebanyak 60% (164 dari 272) korban meninggal adalah perempuan (GWG-UNFPA). Pada bencana erupsi Kelud 2014, 7 orang meninggal dan semuanya adalah lansia, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat erupsi (Aksara, 2014).

Memang kasus erupsi Merapi 2010 menarik karena berbeda polanya. Saat itu, 70% dari korban meninggal adalah laki laki. Namun bila ditelusuri, hal ini juga menunjukkan konstruksi gender dimana

laki-laki harus berani mengambil risiko dan terakhir menyelamatkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak sama dengan perempuan, karena menjelaskan bagaimana konstruksi gender mengatur pembagian peran dan akses serta kontrol sumber daya. Dalam hal ini, konstruksi gender juga bisa menjadikan kelompok arus utama seperti laki-laki menghadapi kerentanan dan risiko yang besar dalam bencana, seperti

juga yang lazim ditemukan dalam bencana konflik sosial (Fatimah, 2012).

Agensi Perempuan: Nona Silubun, Veronika Karabuy & Tukirah

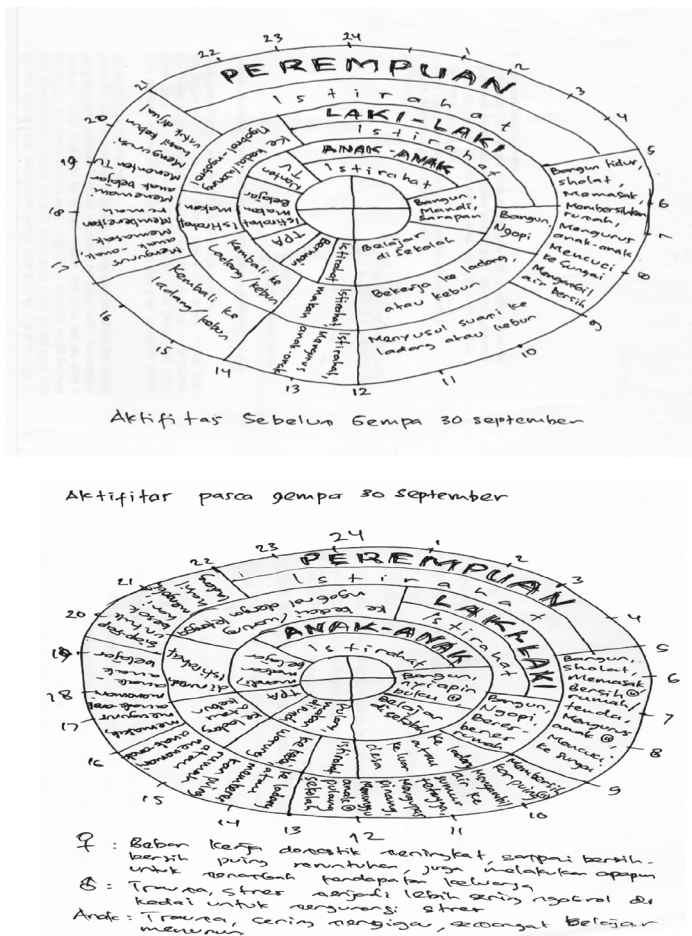
Kerentanan bencana berbasis gender yang lebih kuat dihadapi oleh perempuan tidaklah lantas bisa diartikan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas. Mengabaikan suara perempuan dalam konteks

bencana adalah sebuah kesalahan mendasar. Hal itu tergambar dalam beberapa contoh berikut yang dilihat sendiri oleh penulis; pembelajaran dari gempa Sumatera Barat, kaum perempuan di Korong Sei Geringging mampu melakukan adaptasi, seperti mengolah bahan pangan sesuai dengan pangan lokal yang tersedia, dengan jenis sayur dan sambal. Kaum perempuan juga menanggung beban lebih banyak karena selain melakukan kerja domestik, ia juga harus bekerja membersihkan puing-puing rumah. Di sisi lain, lelaki kepala rumah tangga malah semakin sering mengeluarkan uang untuk bercengkrama melepas himpitan dan trauma di warung kopi.

maupun relawan dari luar Wasior, lebih kurang berjumlah 20-an orang, sembari belajar dari pendampingan Vincentia Widyasari, staf Karina. Nona bertugas memastikan bahwa *assessment*, pendistribusian barang bantuan berjalan dengan baik. Selanjutnya ia juga terlibat dalam survey PDNA (*Post Disaster Need Assessment*) yang dilakukan UNDP untuk melakukan rehabilitasi dan *recovery* Wasior. Nona juga kemudian terlibat dalam upaya pemulihan pemukiman yang dilakukan oleh TPW Manokwari dengan dukungan dari Karina juga kalangan bisnis Indonesia. Ia juga mulai mengkampanyekan upaya pengurangan risiko bencana di Wasior bahkan hingga Keuskupan Manokwari Sorong. Hingga medio 2013, Nona masih aktif menjadi relawan Caritas.

Lain lagi cerita Mama Veronika Karabuy, peyintas (survivor) Bencana Banjir Bandang Wasior, 47 tahun, selama Gereja Stasi St Laurentius menjadi posko koordinasi bersama, Mama Veronika memimpin dapur umum untuk mensuplai logistik bagi para penyintas di titik-titik pengungsian dan bertanggung jawab mengatur menu harian bagi para relawan. Hal lain peran yang dimainkan adalah Mama Veronika menjadi tempat berbagi relawan dan penyintas ketika membutuhkan tempat mencurahkan bebannya. Sementara di Turgo, desa yang terdampak bencana erupsi Merapi 2010, Bu Tukirah menggerakkan para ibu untuk aktif dalam mengelola dapur umum selama dua bulan berada di pengungsian. Ia juga mengajak para Ibu untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan nasib mereka dan keluarganya. Dari persoalan relokasi perumahan, akses layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak, hingga memastikan adanya upaya pemulihan mata pencaharian bagi para korban Erupsi di Desa Turgo. Perempuan pasca erupsi Merapi 2010 mampu menunjukkan kontribusinya dengan memobilisasi sumber daya di masyarakat untuk menyediakan nasi bungkus dan mendistribusikan ke tempat tepat pengungsian mandiri, sekaligus melakukan pendataan jumlah penyintas, dan kebutuhan berdasarkan data pilah.

Sejak tsunami Samudera Hindia menghantam Aceh pada akhir 2004 lalu, Indonesia mengalami metamorfosa paradigma dalam penanggulangan bencana. Bencana tsunami itu begitu dahsyat di luar perkiraan juga kemampuan pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan pasca bencana itu sendiri. Dengan pembelajaran itu, munculah kesadaran bahwa diperlukan lebih dari sekedar



Gambar 3. Aktivitas Perempuan, Laki-laki dan Anak-anak Sebelum dan Pasca Gempa 30 September

Di Wasior, operasi tanggap darurat Gereja Stasi Santo Laurentius dipimpin oleh perempuan lokal, Nona Silubun, 30 tahun. Ia tidak melarikan diri dari Wasior ketika banjir bandang menghantam 2010 lalu, ia memilih bertahan, membantu para korban dan membangun kembali Wasior. Selama kurang lebih satu bulan Nona menggerakkan dan mengkoordinasikan tanggung jawab relawan di Stasi

penanganan bencana, pemerintah dan juga masyarakat menyadari bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat dampak sebetulnya tidak bersifat natural. Kesadaran ini menandai babak baru di mana terjadi transformasi dari pendekatan krisis yang bersifat reaktif kepada pendekatan pengurangan risiko bencana. Pendekatan transformatif Indonesia dalam penanggulangan bencana kemudian memaknai bahwa walaupun sebagian ancaman bencana bersifat natural, namun dampak bencana merupakan kondisi yang kompleks sebagai muara dari persoalan distribusi dan akses berbagai sumber daya pembangunan yang tidak natural. Beberapa inisiasi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun manajemen penanggulangan bencana yang responsive dan terbuka dengan disahkannya UU No. 24 tahun 2007. Dalam laporan *Global Assessment Report 2013*, Indonesia telah membuat perkembangan yang substansial dalam upaya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan lokal, dalam pengelolaan kebijakan dan kerangka hukum. Setelah menyelesaikan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional 2010-2014, Indonesia telah membentuk Badan Penangulanganagn Bencana (BPBD) di 33 propinsi dan BPBD telah berupaya untuk membentuk BPBD di tingkat kabupaten/kota (399 dari 497).

Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam manajemen risiko bencana menggambarkan perhatian dan kepedulian yang meluas dari berbagai pihak. Pengalaman kebencanaan menjadikan modal berharga dalam perubahan transformatif ini. Meningkatnya jumlah inisiatif Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah dipromosikan oleh aktor non negara termasuk NGO, organisasi berbasis keagamaan, kalangan bisnis dan media massa. Salah satu kontribusi yang cukup signifikan diberikan oleh lembaga berbasis keagamaan (*faith based organization*) adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai poros gerakan Islam di Indonesia yang kemudian membentuk mandat khusus bagi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Peanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama (LPB NU). Konferensi Waligereja Indonesia membentuk Karina (Caritas Indonesia), Persatuan Gereja Indonesia membentuk unit khusus penanganan bencana. Juga ada lembaga macam Dompot Duaafa, PKPU dan Yakkum Emergency Unit (YEU). Beberapa

lembaga ini kemudian membentuk forum komunikasi dan koordinasi dalam wadah Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sejak tahun 2009. Pegiat PRB di Indonesia mendesak adanya skema afirmasi dan mendorong prioritas bagi kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 pasal 48, disebutkan bahwa penanggulangan bencana meliputi antara lain perlindungan dan proritas bagi kelompok rentan.

Penutup

Dalam kajian ini, kelompok rentan didefinisikan sebagai orang lanjut usia, anak-anak, perempuan yang sedang mengandung atau menyusui dan penyandang cacat/difabilitas. Keberhasilan mendorong masuknya skema khusus ini menjadi bagian dari memastikan pemenuhan hak bagi kelompok rentan, dan menandai kemajuan dalam pendekatan bencana berbasis hak. Meningkatnya jumlah bencana alam di seluruh dunia dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kerugian aset dan korban jiwa. Hal ini membawa kepada pemahaman dan pemaknaan tentang konsep risiko bencana alam itu sendiri. Konsep tersebut telah berkembang pada satu pemahaman bahwa risiko bencana dapat dikurangi dampaknya. Pemahaman ini juga berkaitan langsung dengan tatanan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus mengutamakan aspek “resiliensi” di tingkat masyarakat. Upaya-upaya membangun resiliensi ini menjadi sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, baik di tingkat lokal maupun global. Upaya membangun resiliensi di tingkat lokal akan semakin baik bila memberikan kesempatan bagi perempuan untuk turut berkontribusi, memenangkan semangat perempuan sebagai agen perubahan sudah tidak bisa ditawar lagi. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Daftar Pustaka

- Adger, WN, Social capital, collective action and adaptation to climate change. *Economic Geography* 79 (4), 2013.
- Besmanos Beverly F. *Women Bridging the Role of the Private Sector and the Government for Disaster Preparedness in a Mining Community*, WISH, 2014.
- Briceno, Salvano, *Gender Mainstreaming in Disaster Reduction*, panel presentation, UNISDR, 2002.
- Ciampi Maria Caterina, Lasap lou, Mukand Dyvia, Turvil Edward; *Gender and Disaster Risk Reduction: A training Pack*, Oxfam, 2011.
- Fatimah Dati, *Menolak Pasrah: Gender, Keagenan dan Kelompok Rentan Dalam Bencana*, Aksara, 2012.
- Guha-Sapir D, Hoyois Ph., Below. R. *Annual Disaster Statistical Review 2012: The Numbers and Trends*. Brussels: CRED; 2013.
- Morrow, BH, *Community Resilience: a Social Justice Perspective, CARRI Research Report 4*, Florida International University, 2008.
- McAslan Alastair, *Community Resilience: Understanding the concept and its Application*, Torrens Resilience Institute, 2011.
- Katie Peters, David Keen and Tom Mitchell, *When Disasters and Conflicts Collide: improving links between disaster resilience and conflict prevention*, ODI, Feb 2013.
- Mitchel T & Harris K., *Resilience: A Risk Management Approach*, 2012 at <http://www.odi.org.uk/publications/6271-resilience-risk-management-climate-change>
- Oxfam, *Building Resilience in Eastern Indonesia report*, not published, 2011.
- UNISDR, *Gender Perspectives : Integrating Disaster Risk Reduction into Climate Change Adaptation*, ISDR, 2008.
- United Nations University, *Comparative Glossary for Core Terms of Disaster reduction*, 2007.

Sumber Online:

- UNISDR (2009). Terminology of disaster risk reduction at <http://www.unisdr.org/we/inform/publications/7817> diakses pada 10 Maret 2015.
- http://www.ifrc.org/PageFiles/139604/Indonesia_DMAAct_2007.pdf, diakses 11 Maret 2015.
- <http://www.preventionweb.net/english/themes/risk-identification/>, diakses pada 19 Maret. 2015.
- <http://www.preventionweb.net/english/themes/risk-transfer/>, diakses pada 19 Maret 2015.
- http://www.preventionweb.net/files/1502_bn050326tsunamiwomen.pdf, diakses 11 Maret 2015

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pimpinan Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i>	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
<i>Loresia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

